

Potensi Konflik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Makassar Tahun 2013

Potential Conflicts in Mayor Direct Elections in Makassar City of Year 2013

Andi Ali Armunanto

Program Studi Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin;
Peneliti pada SERUM Insitute
a.armunanto14@gmail.com

Abstract

This paper aims to describe the factors that influence the conflicts in the mayor direct election in Makassar city of year 2013. The finding of this research there are two factors that influence the conflicts i.e. sociological factor and institutional factor. This research recommends the political parties, KPU, and security apparatus to be responsive before the conflicts escalated.

Keywords: Conflicts, Mayor Elections, Direct Elections, Makassar City

A. Pendahuluan

Salah satu isu yang paling penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat daerah. Hal ini sering dipandang sebagai sebuah titik balik bagi praktek demokrasi di Indonesia, karena untuk pertama kalinya, masyarakat luas dilibatkan secara langsung untuk memilih pemimpinnya.

Dalam pelaksanaannya, Pemilihan kepala daerah secara langsung tidak semulus harapan banyak kalangan. yang terjadi justru menimbulkan kecemasan dibanyak pihak. Hal ini dipicu oleh munculnya berbagai konflik dengan tingkat eskalasi yang cukup besar yang mewarnai perjalanan Pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan di beberapa daerah. Mulai dari pertikaian

antar pendukung, perusakan fasilitas publik hingga perusakan gedung-gedung milik pemerintah yang tak terhitung jumlahnya.

Persoalan-persoalan diatas, tidak mungkin terjadi apabila potensi konflik dalam Pemilihan kepala daerah secara langsung bisa dideteksi sejak awal. Sehingga pemerintah dan penyelenggara pemilu bisa mempersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi terjadinya konflik atau eskalasi konflik kearah yang lebih massif. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait potensi yang mungkin memicu konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk potensi konflik yang terjadi dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pemilukada di kota Makassar. Penulis melakukan penelitian deskriptif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta diskusi kelompok terarah (FGD) dengan beberapa individu dan kelompok yaitu elit politik yang akan ikut pada pemilukada kota Makassar dan tim suksesnya, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, Media massa serta masyarakat umum. Data dari hasil wawancara dan FGD dicatat secermat mungkin dan dikumpulkan. Semua data dianalisis secara kualitatif sehingga apa yang terkandung dibalik realitas dapat terungkap.

B. Pembahasan

Berkaitan dengan potensi konflik pemilukada Kota Makassar tahun 2013, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait faktor pemicu terjadinya konflik pemilukada di Kota Makassar. Dalam hal ini potensi konflik dibagi ke dalam dua faktor yaitu faktor sosiologis, dan faktor institusional.

B.1 Faktor Sosiologis

Pembilahan Sosial Kota Makassar

Teori pembilahan sosial dalam sosiologi dan ilmu politik menjelaskan tentang bagaimana masyarakat dibagi menjadi kelompok. Lipset dan Rokkan, mengutarakan bahwa pembilahan sosial, harus memenuhi tiga syarat. Pertama, harus ada divisi dalam masyarakat berdasarkan faktor demografi atau sosial ekonomi tertentu. Contoh faktor tersebut adalah kelas, pekerjaan, kelompok etnis dan agama yang dianut. Karakteristik ini untuk memisahkan mereka dari anggota masyarakat lainnya. Kedua, orang pada satu sisi kesenjangan sosial harus menyadari bahwa karakteristik obligasi mereka bersama-sama, dan mereka harus menunjukkan kemauan untuk bertindak mempromosikan kepentingan yang terkait dengan identitas sosial mereka.¹

Himar, S.IP dari LSI territorial Sulawesi Selatan mengatakan bahwa: “Konflik pemilukada di Kota Makassar dari segi pembilahan sosial yang ada, kecil kemungkinannya untuk terjadi konflik. Tapi hal ini perlu mendapatkan perhatian, melihat kecenderungan beberapa konflik sosial di luar pemilukada yang terjadi di Kota Makassar seringkali dilatarbelakangi oleh sentimen kedaerahan.”²

Apa yang di katakan oleh informan tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya basis sosial yang berbeda di tengah masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab konflik ketika hal tersebut dijadikan isu oleh tim pemenangan kandidat calon walikota untuk meraih dukungan suara. Sebab jika pembilahan sosial ini dalam titik yang ekstrim bisa memicu ke arah konflik sosial yang besar

¹ Seymour Martin Lipset, *Political Man: Basis Sosial Tentang Politik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta: 2007.

² Wawancara tanggal 28 Oktober 2012

Penelitian ini menggambarkan secara sederhana dasar pembentukan basis-basis sosial di Kota Makassar. *Pertama*, pada basis tradisional yang terdiri dari unsur etnik, budaya, agama dan regional. Etnik mencakupi segala aspek kebudayaan di Kota Makassar. Misalnya, di Makassar terdapat beragam etnik, ada etnik Bugis, Makassar, Mandar, Tionghoa dan lain sebagainya. Keragaman etnik, budaya dan agama ini menjadi sebuah isu yang menarik dalam Pemilu 2013.

Agama sendiri dianggap tidak terlalu menjadi potensi yang besar dalam memicu terjadinya konflik pemilu 2013. Risal Suaib, S.IP (Anggota LSM Active Society) mengemukakan bahwa: “Agama sendiri saat ini mungkin tidak terlalu menjadi isu yang menarik untuk mendapat simpati massa, akan tetapi isu agama perlu dijadikan landasan dalam mengelola konflik yang terjadi atau sebagai sarana peredam konflik.”³

Informan kemudian menambahkan bahwa yang menjadi isu menarik saat ini adalah persoalan regional (kewilayahan). Persoalan kewilayahan juga kadangkala muncul menjadi isu yang dikemas oleh para kandidat dan tim untuk menarik massa, hal ini yang ditakutkan karena ketika pembilahan yang terjadi pada basis tradisional ini melibatkan massa dengan derajat militansi yang cukup tinggi, maka ikatan yang terbentuk cenderung memiliki ikatan emosional yang terjalin di antara massa dan elit politik itu sendiri.

Risal Suaib juga menambahkan, “Kadang kita melihat dalam kampanye kita ada massa-massa yang sudah radikal, sehingga apapun yang menjadi kontraproduktif memunculkan berbagai kekerasan sehingga mengundang konflik manifest. Bahkan terkadang ada massa yang memang sudah ingin mengacaukan, menjadi provokator.”⁴

Apa yang dikemukakan informan tersebut menjadi sebuah contoh bagaimana basis sosial itu mempengaruhi tingkat militansi. Dari pernyataan narasumber tersebut, asumsinya adalah ikatan emosional yang muncul diantara pendukung dan kandidat yang didukungnya bisa menimbulkan militansi yang tinggi yang mengarah kepada radikalitas yang tinggi pula. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional yang terbentuk karena adanya ikatan kekerabatan antara kelompok, etnis, ataupun lapisan masyarakat tertentu dan calon walikota yang ingin dipilihnya. Dengan adanya ikatan emosional yang kuat, kecenderungan untuk membela calon walikota pilihannya akan semakin besar sehingga tingkat militansi massa pendukung akan besar. Sehingga berpotensi menimbulkan konflik pada pemilu 2013 di Kota Makassar tahun 2013.

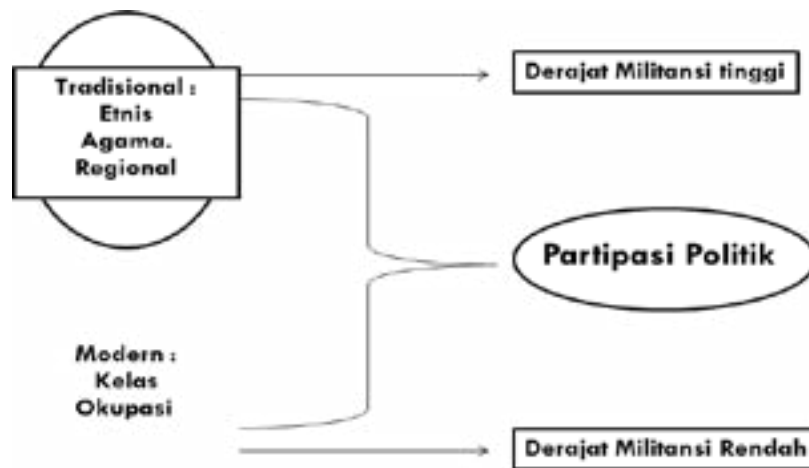
Selain dari basis tradisional, penelitian ini mencoba melihat apakah pembilahan sosial di Makassar ini juga sudah muncul pola-pola modern seperti pembilahan kelas atas, menengah dan bawah apakah sudah hadir di Makassar. Yang dimaksud dengan pembilahan sosial yang moderen adalah pembilahan yang mengikuti pola masyarakat yang industrial yang terbagi karena adanya penguasaan properti dan pembagian kerja. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam basis moderen, para elit politik terkadang memakai sumber-sumber ekonomi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Pembilahan sosial pada basis tradisional dikelompokkan kedalam kelompok dengan tingkat militansi yang tinggi sedangkan pembilahan sosial pada basis pemilih yang modern dikelompokkan kedalam bagian dengan tingkat militansi yang rendah. Untuk lebih jelasnya digambarkan pada skema 1.2. Pembilahan sosial yang dapat memicu terjadi konflik Pemilu 2013 :⁵

³ Dikutip dari Focus Group Discussion yang diadakan oleh SERUM Institute tanggal 17 November 2012 di Hotel Jakarta, Makassar

⁴ Dikuti dari pernyataan yang dikemukakan pada Focus Group Discussion pada tanggal 17 November 2012

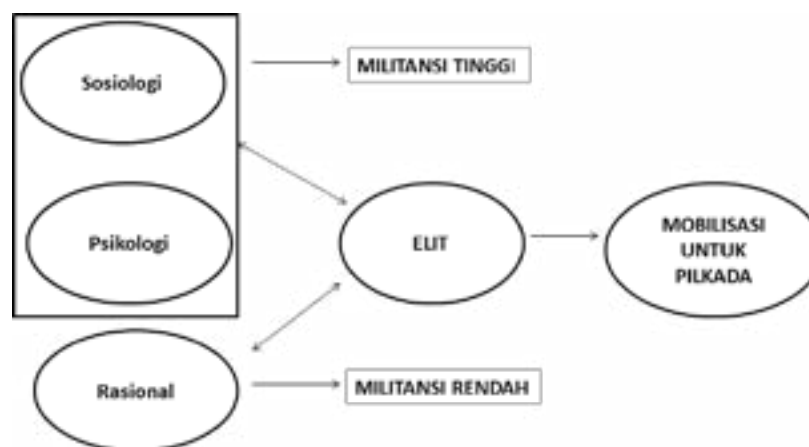
⁵ Analisis dari Serum Institute.



Skema 1.2 Pola Hubungan Politik⁶

Pola Hubungan Politik

Pola hubungan politik yang terbentuk antara elit dengan massa juga menjadi temuan dalam penelitian ini. Di sini peneliti mengidentifikasi ada tiga hubungan politik yang bisa dibangun oleh para kandidat dengan pemilihnya. Masing-masing tipe hubungan politik ini memiliki keunikan tersendiri dan juga memiliki potensi menjadi pemicu konflik mulai dari tingkat yang paling rendah ketingkat yang paling tinggi.



Skema 1.3 Pola Hubungan Politik⁷

a. Hubungan Sosiologis

Dalam melakukan pendekatan dengan massa, para kandidat atau partai politik yang bertarung dalam pilkada memiliki kecenderungan untuk membangun hubungan yang kuat dengan basis massa. Dasar pembentukan hubungan politik ini juga bervariasi. Ada kandidat yang cenderung untuk membangun hubungan politik dengan pemilihnya berdasarkan basis sosial yang ada dengan memanfaatkan hubungan-hubungan sosiologis, seperti kekerabatan, etnis, kelompok, pertaemanan, komunitas, kedaerahan dan lain sebagainya.

⁶ Analisis dari Serum Institute.

⁷ Analisis dari Serum Institute.

Hubungan yang dibentuk dengan basis sosiologis ini cenderung melahirkan hubungan politik yang kuat. Ini dikarenakan ikatan sosial yang kuat dalam keluarga, komunitas, kelompok, etnis, dan lainnya ditransfer menjadi hubungan politik. Hubungan politik ini didasari pada karakter ikatan yang bersifat emosional sehingga ketika ikatan yang kuat ini dimanfaatkan untuk memobilisasi massa, maka kumpulan massa yang dimobilisasi tersebut cenderung untuk militan. Tingginya tingkat militansi dalam hubungan ini akibat dari hubungan emosional yang kuat, dan hal ini memiliki potensi yang besar untuk menjelma menjadi radikalisme jika diarahkan atau diprovokasi untuk hal-hal yang negatif. Dalam hal ini, hubungan politik ini bisa saja dimanfaatkan untuk mendorong massa melakukan tindakan-tindakan anarkis, seperti perusakan, penyerangan, dan lain sebagainya.

Dalam wawancara peneliti dengan salah satu informan yang mengaku mendukung salah satu calon walikota Makassar pada pemilihan sebelumnya, karena mempunyai hubungan kekeluargaan dengan calon tersebut. Informan yang bernama Ibu Lia mengatakan; “Dalam melakukan sosialisasi, saya sering pula menggunakan pemikat berupa uang dan berbagai barang yang biasa diberikan saat kampanye. Saya memang terlibat dalam urusan kampanye tapi tidak ikut saat pemilihan umum berlangsung. Saya hanya menjalankan tugas sebagai tim pemenangan karena yang menjadi calon walikota adalah keluarga saya.”⁸

Wawancara yang peneliti lakukan dengan informan tersebut menunjukkan bahwa ikatan emosional yang terbangun antara informan dengan calon walikota adalah dengan menggunakan hubungan politik dengan tipe sosiologis. Peneliti menemukan beberapa kandidat membangun hubungan politik dengan memanfaatkan ikatan kekerabatan, komunitas-komunitas ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Selain itu, isu-isu yang digunakan kebanyakan isu-isu yang bersifat sosiologis. Sehingga hal ini bisa mendorong masyarakat untuk memaknai hubungan yang coba dibangun oleh kandidat secara sosiologis. Ini tentu saja akan mendorong terbentuknya hubungan politik yang dilandasi oleh ikatan emosional yang mengambil basis pada komunitas, kelompok, lapisan masyarakat atau etnis tertentu. Jika hal ini dibiarkan, maka para kandidat nantinya akan banyak memiliki pendukung-pendukung yang militan. Sehingga sangat potensial berkembang menjadi massa-massa yang radikal.

b. Hubungan Psikologis

Pada pendekatan ini, calon melakukan pendekatan kepada masyarakat berdasarkan pola-pola ikatan emosional yang kuat, misalnya mendekati individu berdasarkan kesamaan kegemaran, atau kadang-kadang calon kandidat atau partai menciptakan istilah yang secara familiar banyak disukai orang dan kemudian hal itu secara perlahan melat sebagai identitas baru, misalnya istilah komandan yang dipopulerkan oleh pasangan calon gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang. Istilah komandan menjadi bahasa keseharian dan kemudian melekat di benak masyarakat dan tidak menutup kemungkinan kemudian mempengaruhi pilihannya.

Hal lain yang biasa mempengaruhi pilihan masyarakat adalah faktor ketokohan calon yang memiliki kharisma, misalnya ketokohan Qahhar Mudzakkar di Sulawesi Selatan masih memiliki pengaruh besar bagi sebagian orang sehingga ketika anaknya Aziz Qahhar mencalonkan diri maka kehadirannya sangat diperhitungkan mendapatkan dukungan yang besar, terbukti bahwa dengan alasan itu Ilham Arief Sirajuddin memilih Aziz Qahhar mendampingi maju di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013.

Dari pendekatan partai politik, Partai Keadilan Sejahtera memiliki agenda tersendiri

⁸ Wawancara pada tanggal 15 November 2012

mendekatkan diri kepada masyarakat hal ini dijelaskan oleh Anwar, ST selaku Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu PKS Wilayah Sulawesi Selatan, berikut keterangannya ketika peneliti menanyakan pola pendekatan yang dilakukan partainya kepada masyarakat: “PKS sebagai partai yang memiliki tagline Bersih, Peduli, Profesional tentu mencari banyak hal untuk menderivasikan kata-kata itu menjadi agenda nyata, dan internal partai menghasilkan beberapa agenda seperti *Direct Selling*, yaitu melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat, dengan asumsi mengetahui lebih detail persoalan mendasar mereka, kunjungan yang dilakukan kader partai juga dibarengi aktivitas Bakti Sosial, seperti sunnatan massal dan pengobatan gratis. Pada momuntum bulan Ramadhan tahun ini partai mencetuskan agenda Peduli Tetangga, hal ini sebagai wujud penyadaran dan saling mengingatkan betapa pentingnya silaturahmi dijaga, mengingat kondisi saat ini karakter masyarakat kita semakin individualis akibat arus globalisasi.”⁹

Apa yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera adalah upaya untuk dapat diidentifikasi oleh masyarakat sebagai partai yang menjalankan fungsinya. Dengan cara seperti itu maka masyarakat lebih mudah mengenal partai yang bisa memperjuangkan aspirasinya.

c. Hubungan Rasional.

Pada hubungan rasional massa cenderung memilih kandidat yang memberi tawaran visi misi yang dapat meyakinkan mereka akan terwakilinya keinginan dan segala bentuk penyelesaian masalah sosial yang dihadapi dari calon kandidat yang mereka dukung. Pada corak pendekatan rasional peneliti mendapatkan keterangan dari Dedy Wahyudi Hasta Konsultan Insert Institute: “Pada beberapa kesempatan biasanya untuk mendekati segmen pemilih rasional agenda yang banyak dilakukan adalah Focus Group Discussion, seminar dan lebih banyak memanfaatkan media massa dan menciptakan opini yang secara target memang disiapkan untuk mempengaruhi kalangan menengah ke atas”.¹⁰

Pendekatan ini berpendapat bahwa ada variabel lain yang menentukan atau ikut menentukan dalam mempengaruhi hubungan politik. Ada faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi hubungan politik seseorang. Dengan begitu para pemilih bukan hanya pasif tetapi juga aktif dan bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis dan psikologis, tetapi juga bebas bertindak. Faktor-faktor situasional itu dapat berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan. Dengan demikian penjelasan-penjelasan hubungan politik yang telah ada tidak harus permanen, seperti karakteristik psikologis dan identifikasin partai, tetapi berubah-ubah sesuai dengan waktu dan peristiwa-peristiwa politik tertentu. Dengan begitu isu-isu politik menjadi pertimbangan yang penting. Para pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya, para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, dan hubungan politik bukan hanya ditentukan oleh faktor karakteristik sosial dan identifikasin partai.

Terbangunnya hubungan politik melalui pendekatan rasional disebabkan oleh adanya orientasi terhadap isu yang dibangun oleh calon atau partai politik yang dianggap berkualitas, membawa informasi yang dibutuhkan, serta segala identitas yang melekat pada diri calon atau partai politik yang dianggap sesuai dengan harapan masyarakat.

Dari keseluruhan aspek sosiologi politik yang telah dijelaskan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ikatan emosional dapat terbangun karena adanya ikatan kekerabatan, kelompok, maupun lapisan masyarakat dari etnik, budaya, agama dan kedaerahan dapat membangun ikatan emosional yang mempengaruhi hubungan politik seseorang dalam menentukan pilihannya. Ikatan emosional

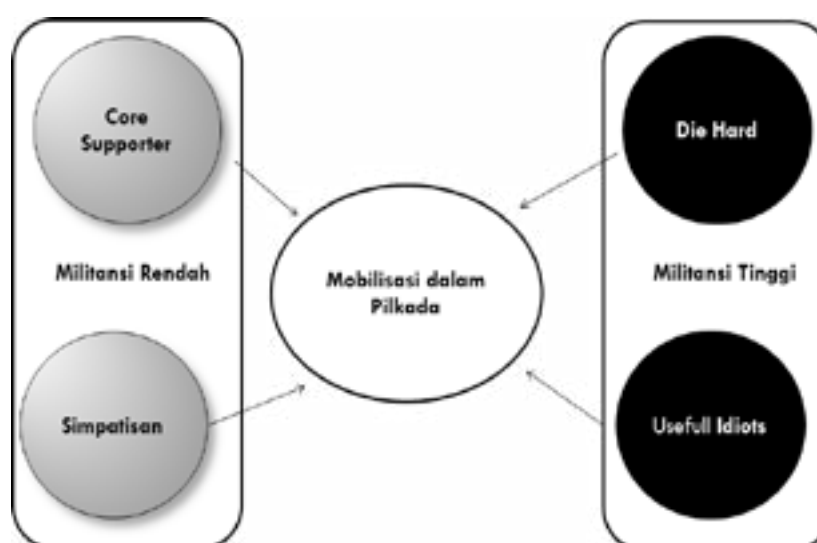
⁹ Wawancara dilakukan pada tanggal 07 November 2012

¹⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2012

yang terbangun juga dapat mempengaruhi tingkat militansi dukungan massa terhadap calon kandidat walikota. Dalam hal ini bisa kita ambil contoh dari aspek hubungan politik yang dibangun atas dasar pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Jika dilihat dari aspek lainnya yakni dari pola hubungan politik melalui pendekatan rasional, maka pola hubungan yang terjalin adalah hubungan yang berdasarkan pada pendekatan yang dapat diterima oleh akal serta dapat dikaji secara ilmiah. Melalui pendekatan ini calon dituntut untuk bisa meyakinkan masyarakat melalui visi-misi yang realistis. Dalam pendekatan ini derajat militansi masyarakat tergolong rendah karena masyarakat lebih mengedepankan hasil pemikiran daripada kedekatan emosional.

Karakteristik Pemilih di Kota Makassar

Pada pembahasan ini secara umum, peneliti mengkategorikan karakteristik pemilih di Kota Makassar berdasarkan tingkat militansinya (Lihat Skema 1.4 Karakteristik Pemilih).¹¹



Skema 1.4 Karakteristik Pemilih

Pada zona dengan tingkat militansi tinggi, peneliti memasukkan kelompok pemilih dalam:

1. *Die Hard Supporter*

Kelompok pemilih *Die Hard Supporter* dalam istilah yang lain dikenal juga dengan sebutan *True Believers*, adalah mereka yang rela berkorban baik itu moral dan materi, bahkan rela mati demi keyakinannya. Menurut data yang peneliti temukan dilapangan, kelompok ini yang menjadi penyumbang terbesar konflik. Karena mereka sangat radikal terhadap sebuah pilihan, contoh sederhanya adalah seperti supporter sepak bola.

Bagaimana bentuk radikalisme pendukung pada kelompok *Die Hard Supporter* ini, tergambarkan melalui wawancara peneliti dengan salah satu informan yang bernama Kosgoro dengan latar belakang pekerjaan sebagai karyawan swasta. Informan menyatakan bahwa saat ini informan terlibat di dalam partai Golkar. Informan mengaku bahwa keterlibatannya dalam partai Golkar sudah lama. Alasan loyalitas informan terhadap partai tersebut karena orang tua informan adalah kader dari partai Golkar sekaligus Pegawai Negeri Sipil di era orde baru. Alasan lainnya yang informan kemukakan karena dari nama Informan yang merupakan sayap dari partai Golkar era orde baru Kosgoro (Koperasi Gotong Royong). Informan saat ini juga bekerja di *showroom*

¹¹ Anthony Down, *An Economic Theory of Democracy*, 1957.

mobil milik salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, jadi informan akan tetap bernaung di bawah pohon beringin dalam hal ini partai Golkar. “Saya akan memilih pemimpin yang berasal dari Partai Golkar, walikota ataupun Gubernur nantinya harus berasal dari partai Golkar. Dukungan akan saya berikan, bahkan sampai nyawa sekalipun akan saya berikan. Saya rela berkoban apa saja demi Partai Golkar”¹²

Pernyataan ini memberikan gambaran bahwa ikatan emosional yang terjalin pada informan dan partai Golkar membuat informan menjadi pendukung yang setia pada Partai Golkar. Ikatan emosional ini menjadikan Kosgoro menjadi pemilih yang militan. Sehingga pemilih akan melakukan apapun agar pilihannya dapat menang. Pendukung yang seperti ini tentunya akan radikal dan menjadi pemicu terjadinya konflik pada pemilukada nantinya.

2. *Usefull Idiots*

Kelompok ini adalah mereka yang tidak punya kepentingan politik tapi mereka mudah di dimanfaatkan karena mereka adalah orang-orang pragmatis. Kadang-kadang ada tenaga-tenaga bayaran yang memang sengaja di bayar untuk ikut berkampanye misalnya dengan diberikan baju kaos, diberikan uang, dan kadangkala karena mereka tidak tahu dan tidak mempunyai koordinasi yang baik dan hal yang bisa memicu munculnya pergesekan karena pada kelompok ini cenderung mudah di mobilisasi.

Dari pengakuan salah satu masyarakat yang bernama Usman yang bekerja sebagai mandor yang diwawancarai menyatakan: “Jika saya diajak untuk mengikuti kampanye saya pasti ikut, walaupun bukan itu yang saya pilih nanti, asal ada yang panggil saya dan kelompok saya, dan kalau sekalian dikasih uang jalan atau baju”¹³.

Peneliti mengkategorikan informan ini ke dalam karakteristik pemilih *usefull idiots* atau pemilih bayaran. Informan tidak terikat pada sebuah partai politik tertentu, informan menjadi anggota kelompok tertentu, dan informan hanya mengikuti apa yang kelompoknya kerjakan dan tentunya Usman serta kelompoknya lebih memilih orang yang memberikan uang atau baju pada kelompoknya tersebut. Karakter pemilih seperti Usman ini juga bisa berpotensi menimbulkan konflik. Karena jika pemilih mudah dimobilisasi hanya karena bayaran maka selanjutnya pemilih juga akan lebih cenderung untuk mengikuti semua tindakan dari kelompoknya jika terjadi gesekan antar pendukung yang lain.

Hal serupa juga peneliti temukan pada informan yang bernama H. Siao yang berprofesi sebagai penjual batak. Dari informasi yang didapatkan, Informan tidak tahu sama sekali mengenai partai politik, apalagi hal-hal yang terlibat dalam masalah struktur partai politik dan sebagainya. Informan mengatakan: “Saya sama sekali tidak tahu tentang partai politik. Dulu saya pernah ikut kampanye, itupun karena disuruh oleh Pak RT untuk ikut kampanye. Pak RT memberikan baju dan uang jalan pada saya jadi saya ikut kampanye bersama warga yang lainnya. Kalau ada yang ingin mengajak saya kampanye lagi, saya pasti ikut yang penting ada uang jalannya.”¹⁴

Dari informasi yang didapatkan, informan tersebut juga mudah untuk dimobilisasi oleh Ketu RT yang mengajaknya ikut kampanya hanya karena diberikan baju dan uang jalan. Hubungan yang terbangun karena adanya ikatan emosional antara informan dan Ketua RT yang mengajaknya, sehingga dengan mudahnya informan memilih untuk ikut mendukung salah satu calon walikota dan terlibat dalam kampanye.

Dari Uraian diatas kita bisa menyimpulkan bahwa kelompok *Die Hard Supporter* dan

¹² Wawancara pada Tanggal 15 November 2012

¹³ Wawancara pada tanggal 14 November 2012

¹⁴ Wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2012

usefull idiots merupakan kelompok pendukung yang didalamnya terdapat hubungan emosional yang terjalin antara pendukung dan elit politik. Kecenderungan pendukung ini menjadi militan karena mudahnya pendukung untuk dimobilisasi karena adanya ikatan emosional yang kuat dengan kandidat atau kelompoknya. Hal ini tentu saja akan berimplikasi pada tingkat militansi yang tinggi. Jika massa dimobilisasi ke arah yang negatif kecenderungan untuk menjadi radikal dapat terjadi dan konflikpun tidak dapat dihindarkan.

Selanjutnya dalam zona militansi rendah dinamakan kelompok pendukung:

1. *Core Supporter*

Kelompok ini adalah orang yang memang mempunyai kepentingan politik, berafiliasi pada parpol tertentu, dan kelompok ini adalah mereka yang mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi di dalam partai misalnya mereka yang menjadi tim pemenang maupun orang-orang dalam partai.

Pendukung yang tergolong dalam kelompok *Core Supporter* adalah mereka yang mempunyai hubungan politik karena adanya ikatan kelembagaan atau organisasi. Pendukung yang tergabung dalam kelompok *Core Supporter* cenderung memilih calon karena adanya visi misi atau tujuan yang sama dengan calon yang dia dukung tersebut seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan yang peneliti wawancarai dilapangan yang bernama Ansar (pegawai swasta): “Saya pernah masuk dalam struktur partai Demokrat, pada periode yang lalu di bidang HUMAS. Saya ikut kampanye dan mendukung calon yang diajukan oleh partai Demokrat karena alasan satu visi dan misi dengan saya dan karena diajukan oleh partai Demokrat. Saya tidak akan memilih calon yang berbeda tujuan dengan saya.”¹⁵

Dari informasi yang informan kemukakan tersebut, diasumsikan bahwa ikatan yang terbangun antara pendukung dengan calon yang didukungnya adalah ikatan institusional. Ikatan yang seperti ini cenderung mendorong pemilih untuk memilih karena alasan tertentu misalnya karena adanya kesamaan kepentingan atau karena kesamaan visi dalam memnadang suatu hal. Ikatan yang terbentuk dengan dasar institusional biasanya bersifat rasional sehingga hubungan ini tidak melibatkan faktor emosional yang mendalam. Dalam perkembangan selanjutnya, tipe hubungan ini tidak mendorong pemilih untuk menjadi militan karena sifatnya yang lebih transaksional.

2. *Simpatisan*

Kelompok ini adalah mereka yang hanya memilih berdasarkan informasi yang mereka terima. Orang yang berada pada kelompok ini adalah mereka yang tidak mempunyai ikatan pada organisasi manapun, partai politik manapun, tidak memiliki ikatan emosional dan organisasional terhadap kandidat yang ada. Kelompok ini hanya bereaksi berdasarkan rasionalisasi dari apa yang ditawarkan oleh kandidat dan tim suksesnya.

Keempat jenis kelompok masyarakat inilah yang membentuk struktur pendukung kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan walikota makassar. Jika kelompok yang berada pada zona dengan tingkat militansi tinggi lebih besar pemanfaatannya dalam kegiatan politik dalam hal ini dalam Pemilihan Walikota Makassar nantinya maka ini rawan memicu potensi konflik yang lebih besar. Ini dikarenakan orang-orang dalam kelompok *Die Hard Supporter* dan *Usefull Idiot* adalah orang-orang militan, ketika mereka di mobilisasi dan di eksploitasi secara negatif dalam pilkada, bisa melakukan berbagai tindakan radikal yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam pilkada. Berbeda dengan kelompok pemilih dengan tingkat militansi rendah yakni *Core*

¹⁵ Wawancara dilakukan pada tanggal 14 November 2012

Supporter dan *Simpatisan*, pada kelompok ini pemilihnya lebih cenderung mengarah ke tingkat pemilih rasional sehingga pada kelompok pemilih ini tingkat militansi rendah dan ketika mereka dimobilisasi untuk berbagai kegiatan politik, mereka cenderung tidak radikal.

Faktor Institusional

Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara pemilu yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang bertugas untuk menyukseskan jalannya pemilukada. Dalam hal ini penyelenggara pemilu mempunyai tanggung jawab melaksanakan pemilu dengan damai tanpa ada konflik yang terjadi. Yang termasuk penyelenggara pemilu adalah KPU dan aparat keamanan.

a. Komisi Pemilihan Umum

Pada kenyataan yang peneliti temukan bahwa penyelenggara pemilu itu sendiri justru sering menjadi pemicu terjadinya konflik. Salah satu anggota Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar, Agus Salim berpendapat: “Berbagai konflik pemilukada di Indonesia itu terjadi karena tidak adanya keterbukaan informasi pada penyelenggara itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah bumerang tersendiri bagi penyelenggara pemilu karena menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.”¹⁶

Hal senada juga dikemukakan oleh salah satu anggota Komisi Informasi Publik yakni Mattewakan, S.IP. “Salah satu potensi konflik di kabupaten dan kota adalah profesionalitas dari penyelenggara dalam hal ini adalah KPU. Tidak adanya transparansi informasi publik yang ada mengakibatkan maraknya konflik pemilu terjadi.”¹⁷

Mattewakan kemudian menambahkan, “Dalam pemikiran saya terkait pelaksanaan pemilu bukan saja KPU tapi juga panwas. Jadi memang penting untuk mengetahui betul KPU ini dan para penyelenggara pemilu lainnya terkait transparansinya karena bukan saja dengan berlakunya undang-undang KIP UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik jadi sudah bukan jamannya lagi untuk saling tutup-tutupan.”¹⁸

Peneliti kemudian berasumsi, bahwa tertutupnya informasi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU mempunyai peran yang besar dalam memicu terjadinya konflik pemilukada. Contohnya pada kasus konflik pemilukada yang terjadi di Kabupaten Toraja, terjadi pembakaran kotak suara milik KPU oleh massa. Hal ini dipicu karena adanya kecurigaan bahwa pihak KPU tidak transparan dalam melakukan perhitungan suara. Hal yang serupa juga terjadi di Kabupaten Soppeng, namun kali ini amuk massa semakin besar dengan membakar kantor KPU.

Menurut Risal Suaib, S.IP dari Active Society Institute (AcSI) menyatakan: “Penyelenggara bisa menjadi akar permasalahan munculnya konflik pemilukada. misalnya pada tahun 2005 di Pangkep terjadi penyegelan kantor KPU oleh massa.”¹⁹

Dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa perlu adanya transparansi publik mengenai hasil pemilu agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat kepada pihak penyelenggara pemilu. Pentingnya membuka informasi kepada masyarakat menjadi poin penting peran

¹⁶ Focus Group Discussion “Menakar Potensi Konflik Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013” pada hari Sabtu, 17 November 2012 di Hotel Jakarta Makassar.

¹⁷ Focus Group Discussion “Menakar Potensi Konflik Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013” pada hari Sabtu, 17 November 2012 di Hotel Jakarta Makassar.

¹⁸ Focus Group Discussion “Menakar Potensi Konflik Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013” pada hari Sabtu, 17 November 2012 di Hotel Jakarta Makassar.

¹⁹ Focus Group Discussion “Menakar Potensi Konflik Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013” pada hari Sabtu, 17 November 2012 di Hotel Jakarta Makassar.

penyelenggara pemilu. Sekarang ini, terkait informasi apapun sudah bisa kita akses dengan melalui TIK. Informasi apa saja sudah bisa didapatkan melalui informasi yang beredar secara online, di media cetak maupun media elektronik, dan lain sebagainya. Jadi semangat perkembangan zaman menuntut adanya transparansi terkait penyelenggaraan negara agar masyarakat juga bisa tahu dan melihat kenyataan yang terjadi.

b. Aparat Keamanan

Faktor lain pemicu terjadi konflik pemilukada ada pada pihak pengamanan dalam hal ini aparat kepolisian yang bertugas mengamankan lokasi terjadinya konflik. Dari data yang ditemukan di lapangan, berdasarkan dari pernyataan Ketua KPU Kota Makassar: “Aparat keamanan juga sangat menentukan munculnya potensi konflik pada pemilukada. Saya beri contoh lagi, pada kasus konflik pemilukada yang terjadi di Kabupaten Soppeng dan Toraja. Bagaimana sikap aparat keamanan yang pada saat itu juga sangat menentukan terjadinya konflik dengan melakukan pembiaran sehingga konflik mengalami eskalasi.”²⁰

Dari penjelasan ketua KPU, peneliti juga menemukan fakta bahwa terjadinya konflik di Toraja disebabkan aparat keamanan melakukan pembiaran kepada massa yang membakar kotak suara milik KPU yang berisi surat-surat suara. Hal tersebut tentunya membuat konflik semakin besar, padahal seharusnya pihak keamanan dalam hal ini aparat kepolisian meminimalisir terjadinya konflik pada saat itu. Penarikan pasukan pengamanan pada saat terjadinya aksi pembakaran kantor KPU di Kabupaten Soppeng juga menjadi pemicu yang besar terhadap terjadinya konflik pemilukada. Sebab jika ditinjau dari aturan pengamanan pemilu, ini sudah menyalahi aturan yang ada.

Konflik Internal Partai Politik.

Pemicu terjadinya konflik selain dari profesionalitas penyelenggara, konflik internal pada partai politik juga bisa menjadi pemicu terjadinya konflik pemilukada. Akar permasalahan yang muncul yakni pada saat penetapan bakal calon kandidat yang akan di usung oleh partai politik tersebut. hal ini juga dikemukakan oleh ketua KPU Kota Makassar yakni Ibu Misnah M. Hattas: “Saya melakukan penelusuran tentang konflik pemilukada di beberapa daerah. Dari penelusuran itu kemudian saya menemukan bahwa penyebab konflik ini selain ada pada penyelenggara terkait dengan profesionalitas, potensi konflik ini juga sangat ditentukan oleh kelompok-kelompok politik, atau partai-partai politik. Salah satu contoh adalah konflik internal pada partai politik. Kita ambil contoh pada kerusuhan Pemilukada yang terjadi di Puncak Jaya yang pada saat itu menewaskan 19 orang warga, pembakaran pada honai-honai terjadi, itu berawal dari konflik politik pada internal parpol itu sendiri.”²¹

Hal serupa juga dikemukakan oleh salah satu akademisi FISIP UNHAS, Prof. M. Kausar Bailusy, MA: “Konflik yg terjadi pada internal partai adalah pada saat penjurangan calon. Terjadi konflik ganda. Calon yang diajukan dari DPC terbantahkan oleh keputusan dari pengurus tingkat pusat dalam hal ini DPP dan pengurus pusat partai politik tersebut.”²²

Dari pernyataan informan, bisa digambarkan bahwa masalah konflik yang terjadi di Internal partai politik itu sendiri yang menjadi akar pemicu terjadinya konflik. Masalah penetapan nomor urut calon terkadang tidak bisa di selesaikan dalam internal partai itu sendiri kemudian

²⁰ Focus Group Discussion “Menakar Potensi Konflik Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013” pada hari Sabtu, 17 November 2012 di Hotel Jakarta Makassar.

²¹ Focus Group Discussion “Menakar Potensi Konflik Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013” pada hari Sabtu, 17 November 2012 di Hotel Jakarta Makassar.

²² Focus Group Discussion “Menakar Potensi Konflik Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013” pada hari Sabtu, 17 November 2012 di Hotel Jakarta Makassar.

masalahnya akan semakin meruncing pada tahap selanjutnya. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pada partai itu sendiri ataupun pada kondisi yang ada pada saat itu.

Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, MA. kemudian menegaskan, “Partai Politik adalah inti. Pemimpin yang baik adalah pemimpin partai yang mampu memanageri partainya dan anggotanya. Rasional adalah dasar untuk memilih seseorang melalui pemikiran yang baik.”²³

Terjadinya konflik internal pada partai politik memberikan pengaruh yang besar pada terjadinya konflik yang berujung kekerasan yang dilakukan oleh para pendukung dari masing-masing kandidat. Tentunya ini akan berdampak panjang hingga pada saat pemilukada berlangsung. Oleh karena itu, partai politik yang terkait sebisa mungkin dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sebelum permasalahan ini muncul dipermukaan dan menjadi permasalahan yang bukan bersifat intern partai lagi bahkan menjadi konsumsi publik sehingga permasalahan yang ada akan semakin besar. Seperti yang dikemukakan oleh informan bahwa, partai politik yang baik itu adalah partai politik yang mampu memanageri partainya dan anggotanya sehingga partai tersebut menjadi partai yang baik kedepannya.

C. Penutup

C.1 Kesimpulan

Faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan konflik pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2013 jika ditinjau dari faktor sosiologis dan faktor institusional.

Faktor sosiologis terdiri atas tiga aspek yakni: (1) pembilahan sosial kota Makassar, (2) hubungan politik, dan (3) karakteristik pemilih kota Makassar. Jika ditinjau dari aspek pembilahan sosial di kota makassar yakni dari basis tradisional dan modern, maka peneliti menyimpulkan yang paling berpotensi menimbulkan konflik pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2013 nantinya adalah massa pendukung dari basis tradisional. Hal ini dikarenakan, ikatan emosional yang terjalin lebih kuat, sehingga lebih mudah untuk dimobilisasi.

Selanjutnya, hubungan politik. Dari ketiga pola hubungan politik yang telah dijelaskan, peneliti berkesimpulan bahwa pola hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik pemilukada adalah pola hubungan sosiologis dan psikologi. Pola hubungan sosiologi paling berpotensi menimbulkan konflik. Sebab, hubungan yang dibentuk cenderung melahirkan hubungan politik yang kuat. Ini dikarenakan ikatan sosial yang kuat dalam keluarga, komunitas, kelompok, etnis, dan lainnya ditransfer menjadi yang bersifat emosional sehingga ketika ikatan yang kuat ini dimanfaatkan untuk memobilisasi massa menjadi militan.

Karakter pemilih yang menjadi faktor yang berpotensi menimbulkan konflik pemilukada adalah kelompok yang tergolong pada tingkat militansi tinggi yakni kelompok *Die Hard Supporter* dan *usefull idiots*. Kedua kelompok ini menjadi sumber konflik terbesar. Utamanya dari kelompok *Die Hard Supporter*. Karena, kelompok ini cenderung akan menjadi kelompok yang radikal dan bisa dimanfaatkan untuk mendorong massa melakukan tindakan-tindakan anarkis, seperti perusakan, penyerangan, dan lain sebagainya

Faktor Institusional terdiri atas dua aspek yakni: (1) penyelenggara pemilu dan (2) konflik internal partai politik. Penyelenggara pemilu ini terbagi lagi atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat keamanan. KPU bisa menjadi sumber terjadinya konflik pada pemilukada ketika tidak terjadi transparansi informasi kepada masyarakat. Masyarakat tidak mungkin melakukan aksi kekerasan jika apa yang ingin diketahuinya bisa didapatkan. Sedangkan sebagai sebuah instansi

²³ Focus Group Discussion “Menakar Potensi Konflik Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2013” pada hari Sabtu, 17 November 2012 di Hotel Jakarta Makassar.

yang bertugas mengamankan jalannya pemilu, aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian yang bertugas dilapangan harus tanggap pada situasi dan kondisi yang terjadi, sehingga jika terjadi konflik maka konflik itu dapat diminimalisir dan tidak mengalami eskalasi konflik.

Konflik yang terjadi pada internal partai politik ini yaitu berawal ketika penjurangan calon, dalam hal ini pada saat penetapan nomor urut calon. Terjadinya konflik internal pada partai politik jika tidak segera diselesaikan di intern partai tersebut maka akan memberikan pengaruh yang besar pada terjadinya konflik yang berujung kekerasan yang dilakukan oleh para pendukung dari masing-masing calon.

C.2 Saran

Dari penelitian yang telah dikerjakan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Konflik bisa di hindari jika masing pihak yang terkait bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
2. Partai politik sebagai salah satu fungsi yang harus dijalankan yakni memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat menyebabkan terjadinya konflik secara destruktif.
3. KPU dan Panwas dapat bersinergi sebagai penyelenggara pemilu yang selalu berada pada posisi yang independen.
4. Pihak keamanan mampu bersikap tanggap dalam menyelesaikan persoalan sebelum konflik itu mengalami eskalasi yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Baghi, Felix. 2012. *Pluralisme, Demokrasi, dan Toleransi*. Yogyakarta: Moya Zam Zam Printika.
- Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi revisi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Down, Anthony. *An Economic Theory of Democracy*, 1957.
- Duverger, Maurice, 1982. *Sosiologi Politik*, Rajawali, Jakarta
- Efriza, 2012. *Political Explore*. Bandung: CV. Alfabeta
- Kartono, Kartini. 1999. *Patologi Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali
- Lexy, J.Moleong, 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lipset, Martin, Seymour. 2007. *Political Man: Basis Sosial Tentang Politik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran Langsung dari Pilkada Langsung*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Nas, Jayadi, 2007. *Konflik Elite di Sulawesi Selatan; Analisis Pemerintahan dan Politik Lokal*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar
- Nasikun, DR . 2011. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Newcomb, Theodore M, dkk. 1978. *Psikologi Sosial*. Bandung : CV. Diponegoro
- Pamungkas, Sigit. 2009. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta : Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM,
- Pickering, Peg. 2001. *Kiat-kiat Menangani Konflik*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang : IKIP
- Rauf, Maswadi. 2000. *Konsensus Politik Sebuah Penajagan Teoritis*. Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional
Ritzer George, 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana Prenada Media group, Jakarta
Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta
Subakti, Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.